



Nasionalisme, Kebangsaan, dan Kewarganegaraan; Komunitas Terbayang, dan Pergulatan Islam-Nasionalisme dalam Sistem Negara-Bangsa di Indonesia

Muhammad Nasrulloh Allutphi¹, Mohamad Rizky Djaba²

¹Mahasiswa Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²Mukti Ali Institute Yogyakarta

E-mail: muhammadnasrullah@gmail.com¹, rizky22dj@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received December 12, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

Nationalism, Islam, Nation-State System, Imagined Community, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the dynamics of nationalism, nationhood, and citizenship within the framework of the nation-state system, particularly in the context of Muslim societies and Indonesia. Employing a qualitative approach through library research, it examines the perspectives of both Muslim and Western scholars on these concepts, as well as how Muslims negotiate their identities amid the pressures of nationalism and secularism. Nationalism is understood as a social construct that shapes collective identity through state institutions, symbols, and historical narratives. In the Islamic world, nationalism generates tensions between loyalty to the state and to the ummah. In Indonesia, nationalism emerged as a response to colonialism and evolved into an inclusive unifying force. The ongoing dialogue between Islam and nationalism reflects efforts to reconcile religious and national identities. Benedict Anderson's theory of "Imagined Communities" is employed to analyze how national and Islamic identities are constructed and intersect within Indonesia's socio-political space. This study underscores the importance of constructing an inclusive and just national narrative capable of embracing identity diversity in modern society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 12, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 23, 2025

Kata Kunci:

Nasionalisme, Islam, Nation-State System, Imagined Community, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika nasionalisme, kebangsaan, dan kewarganegaraan dalam kerangka sistem negara-bangsa (nation-state), khususnya dalam konteks masyarakat Muslim dan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah pemikiran para cendekiawan Muslim dan Barat mengenai konsep-konsep tersebut, serta bagaimana umat Islam menegosiasikan identitas mereka di tengah tekanan nasionalisme dan sekularisme. Nasionalisme dipahami sebagai konstruksi sosial yang membentuk identitas kolektif melalui institusi negara, simbol, dan narasi sejarah. Dalam dunia Islam, nasionalisme menimbulkan ketegangan antara loyalitas terhadap negara dan ummah. Di Indonesia, nasionalisme berkembang sebagai respons terhadap kolonialisme dan menjadi kekuatan pemersatu yang inklusif. Dialog antara Islam dan nasionalisme terus berlangsung, mencerminkan upaya mencari titik temu antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Teori "Imagined Communities" dari Benedict Anderson digunakan untuk memahami bagaimana identitas nasional dan keislaman dikonstruksi dan dipertemukan dalam ruang sosial-politik Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun narasi kebangsaan yang inklusif



dan adil agar mampu merangkul keragaman identitas dalam masyarakat modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Nasrulloh Allutfhi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: muhammadnasrullah@gmail.com

PENDAHULUAN

Identitas dalam bentuk sosial maupun nasional terbentuk melalui konstruksi batas-batas sosial yang dilekatkan pada wilayah teritorial suatu komunitas. Proses ini mencerminkan bagaimana komunitas membentuk rasa kebersamaan dan perbedaan melalui pengakuan terhadap ruang dan simbol-simbol kolektif. Dalam konteks ini, studi mengenai identitas politik dan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap struktur negara modern yang dikenal sebagai sistem negara-bangsa (*The Nation- State System*).¹

Sistem Negara-bangsa ini kemudian memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif melalui institusi-institusi formal, kebijakan publik, serta narasi sejarah yang dikembangkan secara nasional.² Negara dalam kerangka sistem ini menuntut loyalitas utama dan eksklusif dari setiap warganya, menggantikan bentuk-bentuk kesetiaan tradisional seperti agama atau komunitas lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme telah mengambil alih peran agama sebagai prinsip utama yang mengatur kehidupan sosial dan intelektual masyarakat. Nasionalisme tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga menjadi fondasi kultural yang menyatukan dan mengarahkan perilaku kolektif dalam masyarakat modern. Soper dan Fetzer pernah mengungkapkan kondisi tersebut sebagai berikut: “*nationalism takes the place of religion as the principle of governing all social and intellectual life.*”³

Nasionalisme dalam sistem negara-bangsa modern tidak dapat dipungkiri telah menjadi kekuatan dominan dalam membentuk identitas kolektif masyarakat. Negara menuntut loyalitas penuh dari warganya dan menetapkan batas-batas sosial yang menentukan siapa yang termasuk dalam komunitas nasional dan siapa yang berada di luar batas tersebut. Dalam konteks ini, kelompok minoritas sering kali menjadi pihak yang paling rentan.

Sejarah turut mencatat bahwa nasionalisme alih-alih menjadi kekuatan pemersatu, justru kerap bersifat eksklusif dan destruktif terhadap kelompok yang tidak sesuai dengan identitas nasional yang dominan.⁴ Naqvi menambahkan bahwa nasionalisme mendorong lahirnya sekularisme, yang kemudian mengubah definisi minoritas dari berbasis agama

¹ Darussalam, M. F., & Alamsyah, M. S. (2022). RELEVANSI IDENTITAS AGAMA DI TENGAH DOMINASI IDENTITAS NEGARA-BANGSA. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 1-20.

² Supratikno, A. (2023). Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia:-. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 1(1), 1-22.

³ Shortle, A. F. (2020). Religion and Nationalism in Global Perspective. By J. Christopher Soper and Joel S. Fetzer. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. x+ 267 pp. 29.99 paper. *Politics and Religion*, 13(2), 436-438.

⁴ ATAMAN, M. (2010). CHAPTER THREE DIFFERENT PARADIGMS: THE NATION-STATE SYSTEM AND ISLAM MUHITTIN ATAMAN. *Iran and the World: Some Contemporary Developments*, 15.



menjadi berbasis ras, ideologi politik, atau wilayah tertentu.⁵ Peristiwa seperti pengusiran jamaah Ahmadiyah dan larangan pembangunan rumah ibadah merupakan contoh kecil yang terjadi di tanah air. Sedangkan dalam skala global, peristiwa Rohingya di Myanmar, Islamophobia di Eropa dan Amerika, tindakan Rasisme terhadap keturunan Afrika, dan kekerasan berbasis gender masih terus terjadi dan belum menemui penyelesaian.

Dalam dunia Islam, perdebatan antara Islam dan nasionalisme menjadi wacana politik yang sangat penting, terutama pada dekade awal abad ke-20.⁶ Umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan konsep politik Islam dengan gagasan kebangsaan dan kewarganegaraan yang dibawa oleh sistem negara-bangsa. Penerimaan terhadap nasionalisme oleh sebagian kalangan Muslim merupakan strategi untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara modern. Namun, pada akhir abad ke-20, muncul pertentangan tajam antara nasionalisme sekuler yang memisahkan agama dari negara dan nasionalisme Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar identitas politik dan sosial.⁷

Ketegangan ini semakin kompleks dalam konteks negara-bangsa Muslim, di mana batas-batas sosial yang ditetapkan negara turut memengaruhi cara warga Muslim memahami identitas mereka. Masyarakat Muslim dihadapkan pada dilema antara loyalitas terhadap negara atau terhadap *ummah*, yaitu komunitas global umat Islam.⁸ Meskipun sistem *nation-state* telah mengakar kuat di banyak negara mayoritas Muslim, belum ada identitas nasional yang mampu sepenuhnya menggantikan identitas keislaman. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kebangkitan gerakan sosial dan politik Islam yang menunjukkan bahwa umat Muslim mulai kembali menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari *ummah*, sebagai respons terhadap keterbatasan nasionalisme dalam mewadahi aspirasi keagamaan dan kultural mereka.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam bagaimana konsep-konsep pokok dalam Nation-state system ini dibahas dalam pemikiran para cendekiawan muslim maupun barat, terutama di era modern. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dinamika identitas dalam masyarakat Muslim kontemporer yang hidup di bawah sistem negara-bangsa. Dengan meningkatnya kebangkitan gerakan sosial dan politik Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, studi ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana umat Islam menegosiasikan identitas mereka di tengah tekanan nasionalisme dan sekularisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai hubungan antara agama, negara, dan identitas, serta menawarkan perspektif kritis terhadap tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di tengah arus globalisasi dan modernitas politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mendalami konsep nasionalisme, kebangsaan, dan kewarganegaraan dalam kerangka sistem negara-bangsa (*nation-state*). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dipahami dan dikembangkan oleh para cendekiawan

⁵ Naqvi, T. (2012). Migration, sacrifice and the crisis of Muslim nationalism. *Journal of Refugee Studies*, 25(3), 474-490.

⁶ Hairiyah, H. (2022). Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1).

⁷ Chaidar, A. (2013). Negara, Islam, dan nasionalisme sebuah perspektif. *Jurnal Kawistara*.

⁸ Mugiyono, M. (2014). Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 15(2), 97-115.

⁹ Riyadi, A. D., Mulyani, F. A., & Ni'mah, I. R. (2023). Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Pengaruh Gerakan Islam Fundamental, Revivalis, Modernis, Dan Tradisionalis. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 360-368.



Muslim serta pemikir Barat, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pemikiran-pemikiran normatif dan ideologis yang membentuk wacana identitas politik dalam masyarakat modern.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku teori politik, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, serta karya-karya pemikir dari tradisi Barat, maupun dari tradisi pemikiran Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan menitikberatkan pada identifikasi konsep-konsep kunci, perbedaan pendekatan, serta dinamika pemikiran antara dua tradisi intelektual tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara agama, negara, dan identitas dalam masyarakat Muslim kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Nasionalisme

Secara etimologis, istilah “nasionalisme” berasal dari kata *national*, yang berakar dari bahasa Latin *natio*, berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* sendiri berasal dari *nascie*, yang berarti “dilahirkan.” Dalam pengertian awal ini, nasionalisme mengandung makna keterikatan pada komunitas yang lahir dari kesamaan asal-usul atau tempat.¹⁰

Perkembangan yang terjadi dalam pemikiran modern menuntun konsep bangsa dan nasionalisme mengalami perluasan makna yang kompleks dan multidimensional. Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa merupakan kelompok sosial yang tidak dapat dirumuskan secara eksak, karena terbentuk dari kombinasi faktor-faktor objektif seperti keturunan, bahasa, wilayah, adat istiadat, dan agama, namun tidak satu pun dari faktor tersebut bersifat mutlak. Ia juga mendefinisikan nasionalisme sebagai paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara kebangsaan, menggantikan bentuk-bentuk kesetiaan tradisional seperti kepada suku, kerajaan, atau agama.¹¹ Benedict Anderson memperkenalkan konsep bangsa sebagai “komunitas politik yang diimajinasikan” (*imagined political community*), karena para anggotanya tidak saling mengenal secara langsung, tetapi merasa terhubung melalui angan-angan kolektif tentang kebersamaan.¹² Ernest Renan menekankan bahwa bangsa adalah kesatuan solidaritas yang dibentuk atas kehendak bersama, bukan semata-mata karena kesamaan ras, bahasa, atau agama. Pandangan ini menyoroti pentingnya kehendak kolektif dalam membentuk identitas nasional.¹³

Pemikiran lain datang dari Joseph Stalin yang melihat bangsa sebagai komunitas yang terbentuk dari kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi, dan psikologi yang stabil serta berkembang secara historis dalam satu kebudayaan.¹⁴ Di sisi lain, Ernest Gellner menekankan bahwa nasionalisme adalah upaya untuk menyelaraskan budaya dengan struktur politik, yakni menjadikan budaya dominan sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara.¹⁵

¹⁰ Alfaruqy, M. Z., & Masykur, A. M. (2014). Memaknai nasionalisme. *Jurnal Empati*, 3(2), 246-256.

¹¹ Fadilah, P. R., Mutasimbillah, M., & Ajmain, M. (2025). Nasionalisme: Arti dan perkembangannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5133-5140.

¹² G Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282-288). Routledge.

¹³ Renan, E. (2002). What is a Nation?(1882). In *Nationalism in Europe* (pp. 54-66). Routledge.

¹⁴ Vilkov, V. (2019). Russian Marxist conception of the nation by Joseph Stalin and de-Stalinization trends in Soviet social science in the second half of the twentieth century. *Norwegian Journal of development of the International Science*, (36-4), 39-48.

¹⁵ Gellner, E. (2015). Nations and nationalism. In *Conflict after the Cold War* (pp. 378-389). Routledge.



Dalam konteks Indonesia, Sartono Kartodirdjo memformulasikan nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup lima prinsip utama: kesatuan (*unity*), kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*equality*), kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*). Sementara itu, Ensiklopedi Indonesia mendefinisikan nasionalisme sebagai sikap politik dan sosial dari kelompok bangsa yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan tujuan bersama, yang melahirkan rasa kesetiaan mendalam terhadap bangsa.¹⁶

Menurut Azyumardi Azra, Islam pada awalnya tidak mengenal konsep nasionalisme seperti yang dipahami dalam konteks modern. Islam hanya mengenal dua wilayah, yaitu *Darul Islam* (wilayah damai) dan *Darul Harb* (wilayah perang). Konsep negara-bangsa yang muncul kemudian menimbulkan ketegangan karena bertentangan dengan konsep khilafah dan pan-Islamisme. Meskipun terdapat istilah seperti "*millah*" dan "*ummah*" dalam Islam, keduanya lebih merujuk pada komunitas sosio-religius, bukan entitas politik seperti negara-bangsa yang didasarkan pada etnisitas, budaya, bahasa, dan wilayah.¹⁷

Nasionalisme dalam dunia Islam mulai berkembang seiring interaksi dengan negara-negara Eropa, seperti yang terjadi di Turki Utsmani. Turki menjadi salah satu negara Muslim yang menerima konsep nasionalisme ala Barat, terutama dalam bidang administrasi dan militer.¹⁸

Meskipun istilah nasionalisme tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para ulama seperti Quraish Shihab dan Mustaqim menyatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme dapat ditemukan dalam substansi ayat-ayat Al-Qur'an, seperti nilai persatuan, pengorbanan, kesetiaan, ketaatan hukum, dan toleransi antarumat beragama.¹⁹ Quraish Shihab juga menegaskan bahwa unsur-unsur nasionalisme seperti kesamaan keturunan, bahasa, adat, sejarah, dan cinta tanah air tercermin dalam Al-Qur'an. Misalnya, QS. Al-Fajr [89]:8 menggambarkan kebanggaan terhadap kota Iram tanpa merendahkan bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendukung semangat kebangsaan yang inklusif dan tidak eksklusif, yakni mencintai bangsa sendiri tanpa merendahkan bangsa lain. Nasionalisme dalam Al-Qur'an dipahami sebagai semangat kebangsaan yang luas dan moderat. QS. Al-Hujurat [49]:13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Ini menunjukkan bahwa batas-batas wilayah tidak harus memecah belah umat Islam, melainkan bisa menjadi sarana memperkuat persatuan dalam keragaman.²⁰

Pemikiran cendekiawan Muslim modern mengenai konsep nasionalisme terbagi menjadi dua kelompok utama: golongan penolak (*rejectionist*) dan golongan penerima (*conformist*). Golongan penolak menentang nasionalisme karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tokoh seperti Hasan Al-Banna dan Said Hawwa menilai nasionalisme sebagai ancaman terhadap kesatuan umat Islam.²¹ Organisasi seperti Muslim World League di Arab Saudi juga menolak nasionalisme Arab sekuler. Di Palestina, Hamas dan Jihad Islam muncul

¹⁶ Amin, S. (2025). Mewujudkan Indonesia Maju: Korelasi dan Relevansi Pemikiran Sartono Kartodirdjo terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud MD. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 8(1), 60-71.

¹⁷ Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.

¹⁸ Jannah, M., Sukino, P., & Sadikin, M. (2020). Nasionalisme Di Dunia Islam. *MASA: Journal of History*, 2(1).

¹⁹ Mustaqim, A. (2011). Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 109-130.

²⁰ Shihab, M. Q. (2020). *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Lentera Hati Group.

²¹ Otoman, O. (2015). Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906–1949) Dan Pembentukan Radikalisme Islam. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 15(1), 35-78. Lihat juga Ali, M. (2014). Nationalism and Islam: perspective of Egyptian and Syrian Muslim intellectuals. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(1), 51-79.



sebagai reaksi terhadap nasionalisme sekuler PLO.²² Di Pakistan, tokoh seperti Muhammad Ali Jinnah dan Zia ul-Haq menegaskan bahwa umat Islam adalah satu bangsa tanpa batas geografis.²³

Pandangan serupa juga dianut oleh kalangan Syiah, terutama Ayatullah Khomeini yang menganggap nasionalisme sebagai sumber penderitaan umat Islam. Ia menilai bahwa nasionalisme menyebabkan diskriminasi dan eksploitasi terhadap kelompok lemah. Dalam seminar internasional yang digelar di London tahun 1985, para pemimpin Syiah menyatakan penolakan terhadap nasionalisme dan menegaskan pentingnya solidaritas Islam sebagai pengganti identitas kebangsaan.²⁴

Sebaliknya, golongan conformist seperti Said Nursi menerima nasionalisme dalam batas tertentu. Ia membedakan antara nasionalisme positif dan negatif. Nasionalisme positif dipahami sebagai bentuk etnisitas yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yang mendorong solidaritas, kerjasama, dan persaudaraan antar umat. Nursi menolak nasionalisme negatif yang bersifat rasis, eksklusif, dan merugikan bangsa lain, serta menolak nilai-nilai Islam. Ia menekankan bahwa Islam adalah satu-satunya identitas kebangsaannya.²⁵

Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan, mengembangkan konsep nasionalisme sosial dan nasionalisme politik. Ia menilai bahwa keterikatan pada budaya dan sejarah bersama tidak bertentangan dengan Islam selama tidak mengarah pada loyalitas eksklusif terhadap negara-bangsa. Menurutnya, nasionalisme politik yang menempatkan negara di atas segalanya akan bertentangan dengan ideal Islam. Oleh karena itu, sistem multi-negara tetap bisa selaras dengan kesetiaan terhadap umat Islam secara keseluruhan.²⁶

Baik nasionalisme positif ala Nursi maupun nasionalisme sosial versi Rahman mencerminkan pendekatan pluralisme yang sejalan dengan pandangan Islam klasik. Keduanya menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan umat Islam tanpa mengorbankan identitas etnis atau budaya, selama tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan perpecahan atau dominasi satu kelompok atas yang lain.

Kajian mengenai nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, ideologis, dan kultural tempat ia berkembang. Pemikiran para cendekiawan Barat dan Muslim menunjukkan bahwa nasionalisme bukanlah konsep yang netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan konstruksi sosial yang terus berubah. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh identitas dan ideologi, pemahaman yang mendalam terhadap nasionalisme menjadi sangat penting untuk merumuskan kembali konsep kebangsaan dan kewarganegaraan yang inklusif, adil, dan mampu mengakomodasi keragaman dalam masyarakat modern, termasuk dalam komunitas Muslim kontemporer.

2. Gagasan Nasionalisme, Kebangsaan, dan Kewarganegaraan di Indonesia

Nasionalisme politik di Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20, dipelopori oleh kaum intelektual dan terpelajar yang membentuk organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Organisasi ini menjadi tonggak awal kesadaran kebangsaan di kalangan priyayi, sebagaimana

²² Jannah, M., Sukino, P., & Sadikin, M. (2020). Nasionalisme Di Dunia Islam. *MASA: Journal of History*, 2(1).

²³ Hartiwi, I. D., & Marpuah, S. (2023, January). Integration of the Qur'an on Indonesian's Nationalism in Political Islamic Perspectives Mahmud Syaltut and Ali Jinnah. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY* (Vol. 2, No. 1).

²⁴ Banuazizi, A. (2026). *Nationalism and Religion in Iran*. In *The Routledge Handbook of Religion and Nationalism* (pp. 310-324). Routledge.

²⁵ Khaja, M. A. (2018). Nationalism in the writings of Iqbal and Said Nursi: A Comparative study of their perspectives. *A Social Science Journal*, 11, 49-62.

²⁶ Rahman, F. (1985). Islam in Pakistan. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 8(4), 34.



dijelaskan oleh Robert van Niel. Para tokoh seperti Wahidin Soedirohusodo dan Sutomo memelopori gerakan ini, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi muda seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan lainnya. Mereka membentuk elite modern Indonesia yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kesadaran ini tumbuh sebagai respons terhadap penindasan kolonialisme Belanda dan Jepang yang menerapkan sistem kapitalisme modern yang menindas rakyat secara politik, ekonomi, dan budaya.²⁷

Kapitalisme kolonial membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, kebodohan, dan penderitaan yang meluas. Sistem ini tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi juga merusak tatanan budaya lokal melalui penetrasi nilai-nilai asing. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia sejak awal memiliki karakter anti-kolonial dan anti-kapitalistik. Nasionalisme ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan fisik, tetapi juga dari dominasi ideologis dan kultural yang mengancam identitas bangsa. Dalam konteks ini, nasionalisme menjadi alat perjuangan untuk membangun kembali martabat dan kemandirian bangsa Indonesia.²⁸

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, memberikan kontribusi penting dalam membentuk konsep nasionalisme yang berakar pada nilai-nilai kultural dan spiritual bangsa. Ia menekankan bahwa rasa kebangsaan tumbuh dari rasa percaya diri, yang kemudian berkembang menjadi rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial. Nasionalisme menurutnya bukan sekadar semangat politik, tetapi juga kesadaran moral untuk menyatukan kepentingan pribadi dengan kepentingan bangsa. Dalam pandangan ini, penderitaan dan kehormatan bangsa dirasakan sebagai bagian dari identitas pribadi setiap warga negara, sehingga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap nasib bangsa.²⁹

Sementara itu, Ir. Soekarno sebagai tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mendefinisikan bangsa sebagai sekelompok manusia yang memiliki keinginan kuat untuk bersatu, berbagi kesamaan sifat, dan hidup dalam satu wilayah geopolitik. Ia menekankan pentingnya “watak nasional” sebagai identitas kolektif yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Watak nasional ini mencakup nilai-nilai keberanian, solidaritas, dan semangat juang yang menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan. Soekarno melihat nasionalisme sebagai kekuatan pemersatu yang mampu mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya demi tujuan bersama: kemerdekaan dan keadilan sosial.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari pengalaman historis yang khas, yaitu penindasan kolonial dan perjuangan untuk merdeka. Nasionalisme ini tidak bersifat eksklusif atau chauvinistik, melainkan inklusif dan berorientasi pada pembebasan serta pembangunan bangsa. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif yang dibentuk oleh pengalaman bersama, nilai-nilai budaya, dan cita-cita kemerdekaan. Dalam kerangka ini, nasionalisme Indonesia menjadi kekuatan moral dan politik yang menggerakkan rakyat untuk bersatu, melawan penjajahan, dan membangun masa depan yang lebih adil dan bermartabat.³⁰

²⁷ Yuliati, D. (2009). Menyibak Fajar Nasionalisme Indonesia. *Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Sejarah Regional Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Pondok Tingal Magelang*, 23.

²⁸ Bustomi, M. A., Nisa, R. A., Nurdiani, S., Auliani, D., & Ajmain, M. (2025). DINAMIKA NASIONALISME DI INDONESIA: DARI KOLONIALISME KE ERA DIGITAL. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 10494-10501.

²⁹ Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional.

³⁰ Romualdi, K. B. (2024). Analisis Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3761-3766.



Dialog antara nasionalisme dan Islam di Indonesia merupakan salah satu dinamika paling kompleks dalam sejarah dan perkembangan politik kebangsaan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia tidak dibangun di atas fondasi *nation character building* yang mapan, sehingga relasi antara agama dan negara terus menjadi perdebatan terbuka.³¹ Dalam konteks ini, nasionalisme dan Islam bukan sekadar dua ideologi yang berdiri sendiri, melainkan dua kekuatan sosial dan kultural yang saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan berkompetisi dalam membentuk identitas bangsa. Ketegangan ini mencerminkan upaya untuk mencari titik temu antara aspirasi keagamaan yang bersifat transenden dan semangat kebangsaan yang berakar pada realitas pluralistik Indonesia.³²

Sejarah mencatat bahwa para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir, bersama tokoh-tokoh Islam seperti HOS Tjokroaminoto dan SM Kartosoewirjo, memiliki pandangan yang beragam mengenai hubungan Islam dan negara. Perbedaan ini menciptakan ruang dialog yang dinamis, baik dalam forum formal seperti Konstituante maupun dalam gerakan sosial-politik di luar parlemen. Perdebatan mengenai dasar negara antara Pancasila dan Islam menjadi contoh nyata bagaimana nasionalisme dan Islam saling berhadapan, namun juga saling memengaruhi. Pancasila, sebagai hasil kompromi politik, menjadi titik temu yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman dalam kerangka kebangsaan yang inklusif.

Dialog ini tidak selalu berlangsung damai. Ketika aspirasi keagamaan merasa terpinggirkan oleh sistem negara yang dianggap sekuler, muncul reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan Islam politik seperti DI/TII atau gejolak ormas Islam di kaum urban seperti FPI, HTI, dan sejenisnya.³³ Di sisi lain, negara juga sering merespons dengan pendekatan represif, yang justru memperlebar jurang antara negara dan sebagian umat Islam. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dialog antara nasionalisme dan Islam belum sepenuhnya menemukan format yang stabil dan berkelanjutan. Ketika negara menuntut loyalitas tunggal kepada simbol-simbol kebangsaan, sementara sebagian umat Islam menuntut supremasi hukum syariat, maka benturan ideologis menjadi tak terhindarkan.³⁴

Meski demikian, terdapat pula upaya-upaya konstruktif untuk menjembatani kedua kutub ini. Banyak cendekiawan Muslim dan tokoh masyarakat yang berusaha menafsirkan Islam secara kontekstual agar selaras dengan semangat kebangsaan. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam kerangka ini, nasionalisme tidak dipandang sebagai ancaman terhadap Islam, melainkan sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita keislaman dalam kehidupan berbangsa. Dialog ini menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan krisis identitas yang melanda generasi muda Muslim Indonesia.³⁵

Oleh karena itu, memperkuat dialog antara nasionalisme dan Islam bukan hanya soal menyelesaikan konflik ideologis, tetapi juga membangun fondasi kebangsaan yang kokoh dan inklusif. Negara perlu membuka ruang partisipasi yang adil bagi ekspresi keagamaan, sementara komunitas Muslim juga perlu mengembangkan pemahaman Islam yang adaptif terhadap realitas kebangsaan. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh sebagai

³¹ Ryadi, S. (2016). Islam dan Nasionalisme di Indonesia (Sebuah Tinjauan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 4(1), 50-61.

³² Hairiyah, H. (2022). Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1).

³³ Winarno, T. (2021). Old Radicalism dan New Radicalism di Indonesia. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(2), 116-121.

³⁴ Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

³⁵ Amin, N. (2012). Menyemai nasionalisme dari spirit agama: Upaya meredam radikalisme beragama. *Jurnal Theologia*, 23(1), 109-123.



kekuatan pemersatu yang tidak menegaskan identitas keagamaan, melainkan merangkulkannya sebagai bagian dari mozaik kebangsaan yang kaya dan beragam. Dialog ini adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus merawat warisan spiritual umat Islam dalam bingkai negara-bangsa modern.

3. Islam dan Nasionalisme di Indonesia dalam kerangka *Imagined Community* B. Anderson

Dalam kerangka teori *Imagined Communities* yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, bangsa adalah konstruksi sosial yang dibayangkan oleh anggotanya sebagai komunitas politik yang memiliki kesamaan identitas, meskipun sebagian besar anggotanya tidak pernah saling bertemu. Identitas ini dibentuk melalui bahasa, media, sejarah, dan simbol-simbol kolektif yang menciptakan rasa kebersamaan.³⁶ Ketika teori ini diterapkan pada konteks Indonesia, khususnya dalam hubungan antara Islam dan nasionalisme, tampak bahwa ketegangan yang terjadi bukan hanya soal ideologis, tetapi juga soal bagaimana komunitas-komunitas ini dibayangkan dan dikonstruksi dalam ruang sosial-politik yang sama.

Islam sebagai agama universal membentuk *imagined community* tersendiri, yaitu *ummah*, yang melampaui batas-batas geografis dan etnis. Dalam komunitas ini, solidaritas dibangun atas dasar iman dan syariat, bukan atas dasar kebangsaan atau wilayah. Sebaliknya, nasionalisme Indonesia dibangun sebagai komunitas terbayang yang berbasis pada pengalaman kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah. Dua komunitas ini memiliki fondasi imajinatif yang berbeda, sehingga ketika keduanya dipertemukan dalam satu ruang politik bernama negara-bangsa, muncul ketegangan dalam menentukan identitas kolektif yang dominan.

Dalam kerangka Anderson, konflik ini dapat dipahami sebagai kegagalan membangun narasi kebangsaan yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk imajinasi kolektif yang hidup dalam masyarakat. Negara-bangsa Indonesia belum sepenuhnya berhasil membentuk *nation character building* yang inklusif dan representatif. Akibatnya, ruang imajinasi kolektif tetap terbuka untuk diperebutkan oleh berbagai ideologi, termasuk Islam politik. Ketika negara dianggap terlalu sekuler, sebagian umat Islam merasa kehilangan ruang untuk mengekspresikan identitas religius mereka dalam kehidupan publik.

Namun, tidak semua respons dari komunitas Islam bersifat konfrontatif. Banyak cendekiawan Muslim seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh lain mencoba membangun jembatan antara Islam dan nasionalisme.³⁷ Mereka membayangkan komunitas kebangsaan sebagai wadah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, nasionalisme tidak dipandang sebagai ancaman terhadap Islam, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks negara modern. Ini adalah bentuk komunitas terbayang ganda, di mana identitas keagamaan dan kebangsaan dapat hidup berdampingan.³⁸

Penting untuk dicatat bahwa media, pendidikan, dan institusi negara memainkan peran penting dalam membentuk komunitas terbayang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kurikulum sejarah nasional, dan simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan adalah alat-alat yang digunakan untuk membangun kesadaran kebangsaan. Namun, jika alat-alat ini tidak mampu mengakomodasi keragaman identitas, maka mereka justru akan memperkuat eksklusivisme dan resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa

³⁶ Anderson, Benedict. "Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism." *The new social theory reader*. Routledge, 2020. 282-288.

³⁷ YUSDANI, Y. (2023). Gagasan Politik Gus Dur dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 165-174.

³⁸ Anderson, B. (1998). *The spectre of comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the world*. Verso.



terpinggirkan. Oleh karena itu, narasi kebangsaan harus terus diperbarui agar tetap relevan dan inklusif.³⁹

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya arus informasi, tantangan membangun komunitas terbayang yang inklusif semakin besar. Masyarakat kini terpapar berbagai narasi alternatif, termasuk narasi transnasional seperti pan-Islamisme yang menawarkan solidaritas lintas negara. Jika negara tidak mampu menawarkan narasi kebangsaan yang kuat dan bermakna, maka komunitas-komunitas alternatif ini akan menjadi lebih menarik bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat dialog antara nasionalisme dan Islam, bukan dengan pendekatan represif, tetapi dengan pendekatan kultural dan dialogis.⁴⁰

Melalui teori *Imagined Communities*, kita turut diajarkan bahwa bangsa bukanlah entitas yang terbentuk secara alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus. Dalam konteks Indonesia, membangun bangsa berarti membangun narasi kolektif yang mampu merangkul keragaman identitas, termasuk identitas keagamaan. Islam dan nasionalisme tidak harus saling menegasikan, tetapi dapat saling memperkaya jika dikelola dalam semangat inklusivitas dan keadilan. Tantangan terbesar adalah bagaimana membayangkan ulang Indonesia sebagai komunitas politik yang mampu menyatukan berbagai imajinasi kolektif dalam satu visi kebangsaan yang berkeadaban.

KESIMPULAN

Nasionalisme dalam sistem negara-bangsa modern merupakan kekuatan dominan yang membentuk identitas kolektif melalui institusi dan simbol negara. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, nasionalisme sering kali menimbulkan ketegangan dengan identitas keislaman yang bersifat transnasional. Perdebatan antara nasionalisme dan Islam mencerminkan dilema antara loyalitas terhadap negara dan terhadap ummah. Di Indonesia, nasionalisme tumbuh dari pengalaman kolonial dan perjuangan kemerdekaan, membentuk identitas kebangsaan yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai budaya serta spiritual. Dialog antara Islam dan nasionalisme di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, namun juga membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai keislaman dalam kerangka kebangsaan. Melalui pendekatan teori “*Imagined Communities*”, dapat dipahami bahwa bangsa adalah konstruksi sosial yang perlu terus diperbarui agar tetap relevan dan inklusif. Oleh karena itu, membangun narasi kebangsaan yang mampu mengakomodasi keragaman identitas, termasuk identitas keagamaan, menjadi kunci dalam menjaga keutuhan dan keadilan dalam masyarakat negara-bangsa modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Alfaruqy, M. Z., & Masykur, A. M. (2014). Memaknai nasionalisme. *Jurnal Empati*, 3(2), 246-256.
- Amin, N. (2012). Menyemai nasionalisme dari spirit agama: Upaya meredam radikalisme beragama. *Jurnal Theologia*, 23(1), 109-123.
- Amin, S. (2025). Mewujudkan Indonesia Maju: Korelasi dan Relevansi Pemikiran Sartono Kartodirdjo terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud MD. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 8(1), 60-71.

³⁹ Anderson, B. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press.

⁴⁰ Anderson, B. (1999). *Indonesian nationalism today and in the future*. Indonesia, 1-11.



- Anderson, B. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Anderson, B. (1998). *The spectre of comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the world*. Verso.
- Anderson, B. (2020). "Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism." *The new social theory reader*. Routledge. 282-288.
- Ataman, M. (2010). Chapter Three Different Paradigms: The Nation-State System And Islam Muhittin Ataman. *Iran And The World: Some Contemporary Developments*, 15.
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.
- Bustomi, M. A., Nisa, R. A., Nurdiani, S., Auliani, D., & Ajmain, M. (2025). DINAMIKA NASIONALISME DI INDONESIA: DARI KOLONIALISME KE ERA DIGITAL. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 10494-10501.
- Chaidar, A. (2013). Negara, Islam, dan nasionalisme sebuah perspektif. *Jurnal Kawistara*.
- Darussalam, M. F., & Alamsyah, M. S. (2022). RELEVANSI IDENTITAS AGAMA DI TENGAH DOMINASI IDENTITAS NEGARA-BANGSA. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 1-20.
- Fadilah, P. R., Mutasimillah, M., & Ajmain, M. (2025). Nasionalisme: Arti dan perkembangannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5133-5140.
- Gellner, E. (2015). Nations and nationalism. In *Conflict after the Cold War* (pp. 378-389). Routledge.
- Hairiyah, H. (2022). Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Hartiwi, I. D., & Marpuah, S. (2023, January). Integration of the Qur'an on Indonesian's Nationalism in Political Islamic Perspectives Mahmud Syaltut and Ali Jinnah. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY* (Vol. 2, No. 1).
- Jannah, M., Sukino, P., & Sadikin, M. (2020). Nasionalisme Di Dunia Islam. *MASA: Journal of History*, 2(1).
- Khaja, M. A. (2018). Nationalism in the writings of Iqbal and Said Nursi: A Comparative study of their perspectives. *A Social Science Journal*, 11, 49-62.
- Mugiyono, M. (2014). Relasi Nasionalisme dan Islam serta Pengaruhnya terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 15(2), 97-115.
- Mustaqim, A. (2011). Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 109-130.
- Naqvi, T. (2012). Migration, sacrifice and the crisis of Muslim nationalism. *Journal of Refugee Studies*, 25(3), 474-490.
- Otoman, O. (2015). Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906–1949) Dan Pembentukan Radikalisme Islam. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 15(1), 35-78. Lihat juga Ali, M. (2014). Nationalism and Islam: perspective of Egyptian and Syrian Muslim intellectuals. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(1), 51-79.
- Rahman, F. (1985). Islam in Pakistan. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 8(4), 34.
- Renan, E. (2002). What is a Nation?(1882). In *Nationalism in Europe* (pp. 54-66). Routledge.
- Riyadi, A. D., Mulyani, F. A., & Ni'mah, I. R. (2023). Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Pengaruh Gerakan Islam



- Fundamentalis, Revivalis, Modernis, Dan Tradisionalis. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 360-368.
- Romualdi, K. B. (2024). Analisis Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3761-3766.
- Ryadi, S. (2016). Islam dan Nasionalisme di Indonesia (Sebuah Tinjauan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 4(1), 50-61.
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Lentera Hati Group.
- Shortle, A. F. (2020). Religion and Nationalism in Global Perspective. By J. Christopher Soper and Joel S. Fetzer. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. x+ 267 pp. 29.99 paper. *Politics and Religion*, 13(2), 436-438.
- Supratikno, A. (2023). Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia:- *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 1(1), 1-22.
- Vilkov, V. (2019). Russian Marxist conception of the nation by Joseph Stalin and de-Stalinization trends in Soviet social science in the second half of the twentieth century. *Norwegian Journal of development of the International Science*, (36-4), 39-48.
- Winarno, T. (2021). Old Radicalism dan New Radicalism di Indonesia. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(2), 116-121.
- Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional.
- Yuliati, D. (2009). Menyibak Fajar Nasionalisme Indonesia. *Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Sejarah Regional Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Pondok Tingal Magelang*, 23.
- Yusdani, Y. (2023). Gagasan Politik Gus Dur dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 165-174.